

RPSEP-73

PENGARUH KINERJA ZAKAT TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN CORPORATE GOVERNANCE BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Amelia Rizky Alamanda S.E, M.Ak, BKP
rizky.khansa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja zakat terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance* pada bank umum syariah periode 2007-2013. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan, laporan zakat, dan laporan pelaksanaan GCG yang dipublikasikan melalui website masing-masing bank syariah yang menjadi sampel selama tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya tiga bank umum syariah. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Data sekunder tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kinerja zakat berpengaruh negatif signifikan terhadap luas pengungkapan *Corporate Governance*.

Kata kunci : Kinerja Zakat, Luas Pengungkapan *Corporate Governance*

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of zakah performance on Corporate Governance Disclosure of Islamic Banks in Indonesia in the 2007-2013 periode. The research was conducted using secondary data from annual reports, charity reports, and report on the implementation of Corporate Governance, published through the website of each Islamic bank to be sampled during 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, and 2013. Samples used in this study only eight Islamic banks. Sampling was done by purposive sampling method. Secondary data were then analyzed using multiple regression. The results showed that zakah performance influence negatively on corporate governance disclosure.

Key words: zakah performance, corporate governance disclosure

PENDAHULUAN

Di tengah fenomena tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah (*Islamic Bank*) terdapat upaya mewujudkan *good corporate governance* pada bank syariah. Beberapa pakar berpendapat bahwa tanpa sebuah mekanisme *good corporate governance* yang efektif perbankan syariah tidak akan tumbuh dan berkembang secara sehat. Selain itu, sebagai lembaga keuangan yang

melibatkan spektrum *stakeholders* yang sedemikian luas, perbankan syariah dituntut untuk memiliki akuntabilitas dan tingkat pengungkapan (*level of disclosure*) yang tinggi atas kinerja operasinya. Dengan demikian, terjadinya kesenjangan informasi (*information asymmetry*) dapat diminimalisasi (Ilyas, 2004).

Perkembangan bank syariah di Indonesia sendiri dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. UU no. 10 Tahun 1998 merupakan regulasi pertama yang mengatur perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan ini bertambah pesat dengan hadirnya Bank Syariah Mandiri sebagai bank umum syariah kedua setelah Bank Muamalat Indonesia dan disusul dengan berdirinya Bank Mega Syariah Indonesia. Undang-undang perbankan syariah juga telah resmi mengatur seluruh operasional perbankan syariah yaitu dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2008.

Perkembangan bank syariah juga diikuti dengan tuntutan pelaksanaan *good corporate governance* dan pengungkapannya bagi pengguna laporan tahunan. Perlunya pengungkapan *good corporate governance* bank syariah tidak lain karena beberapa alasan para ahli yang menganjurkan untuk melakukan hal tersebut untuk tujuan transparansi. Camfferman dan Cooke (2002) meneliti pengungkapan pada laporan tahunan perusahaan-perusahaan di Inggris dan Belanda. Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui perbedaan sistem pengaturan pasar modal, regulasi perusahaan, mekanisme *good corporate governance* pada masing-masing negara. Ditemukan oleh keduanya bahwa Belanda memiliki pendekatan yang lebih tidak ketat dibandingkan Inggris. Penelitian mengindikasikan bahwa pengungkapan tersebut juga dapat digunakan untuk mengetahui mekanisme *good corporate governance* dan kualitas ataupun tingkatan *good corporate governance* suatu negara secara umum.

Wacana *good corporate governance* telah banyak diteliti di berbagai negara. Namun, penelitian tentang pengungkapan *good corporate governance* pada perbankan syariah belum banyak dilakukan. Hal ini dikarenakan industri perbankan syariah masih sangat hijau dan belum memiliki permasalahan yang terlalu kompleks. Namun, agar perbankan syariah semakin memiliki daya tawar di dalam industri keuangan global, penulis merasa perlu adanya upaya lebih bagi perbankan syariah untuk meningkatkan kualitas pengungkapan *good corporate governance* dengan keunikan perbankan syariah yang harus patuh pada aturan syariah. Pendapat ini mendukung pernyataan Algoud dan Lewis (1999) bahwa bank syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang selanjutnya diikuti oleh mekanisme *good corporate governance* pada lembaga tersebut.

Salah satu keunikan dari perbankan syariah adalah bagaimana sebuah bank syariah dapat berpengaruh kepada sektor sosial. Bank syariah tidak hidup dan berkembang hanya untuk *profit*, tapi untuk membangun kemaslahatan umat. Dan zakat merupakan salah satu alat yang digunakan perbankan syariah untuk melakukan hal itu. Walaupun masih ada perbedaan pendapat, apakah sebuah lembaga wajib untuk membayar zakat. Namun zakat merupakan bentuk kontrol sosial terhadap perilaku manusia untuk lebih peka kepada sesamanya. Bank syariah, sebagai lembaga formal dan legal memiliki peran sosial yang sangat besar melalui mekanisme zakat. Sebuah studi mengatakan bahwa melalui mekanisme zakat inilah yang menjadi pertimbangan investor untuk menginvestasikan dananya. Karena zakat, dalam perbankan syariah merupakan metafora amanah. Metafora ini membawa konsekuensi pada organisasi bisnis, yaitu organisasi bisnis yang tidak lagi berorientasi pada laba (*profit-oriented*) atau berorientasi pada pemegang saham (*stakeholder-oriented*), tetap berorientasi pada zakat (*zakah-oriented*). Dengan orientasi zakat, perusahaan berusaha untuk mencapai ‘angka’ pembayaran zakat yang tinggi. Dengan demikian, laba bersih (*net profit*) tidak lagi menjadi ukuran kinerja perusahaan, tapi sebaliknya zakat menjadi ukuran kinerja perusahaan (Triyuwono).

METODOLOGI

Metode Pemilihan Sampel

Penulis menggunakan metode *purposive sampling* dalam penelitian ini yang merupakan metode pengambilan yang didasarkan pada beberapa pertimbangan atau kriteria tertentu. Kriteria bank yang akan menjadi sampel penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan yang tergolong dalam Bank Umum Syariah
2. Melaporkan pelaksanaan *good corporate governance* sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan dipublikasikan selama tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013
3. Membuat laporan keuangan dan laporan zakat yang dipublikasikan selama tahun 2007,2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013.

Operasionalisasi Variabel

Variabel Dependen adalah variabel yang dijelaskan/dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu variabel Luas Pengungkapan *Good*

Corporate Governance. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan standar pengungkapan yang telah ditetapkan Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tentang pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Perbankan Syariah.

Model pengisian indeks pengungkapan GCG untuk setiap bank syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Metode Pengisian Indeks Pengungkapan GCG

Bank Syariah A Tahun xxx	
Disclosure Items	Disclosure Scores (0=tidak diungkap)
	1=Pengungkapan informasi sekilas
	2=Pengungkapan terperinci (Gambar, tabel, diagram/penjelasan kuantitatif dan kualitatif)
1. Kesimpulan dari hasil self assessment atas pelaksanaan corporate governance Bank Umum Syariah	
2. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor, meliputi jenis dan lembar saham pada BUS yang bersangkutan.	
3. Kepemilikan saham anggota direksi yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor, meliputi jenis dan lembar saham pada BUS yang bersangkutan, bank	

lain atau perusahaan yang lain yang berkedudukan di dalam dan luar negeri.	
4. Hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota direksi BUS.	
5. Hubungan keuangan anggota anggota direksi dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota direksi lain.	
6. Hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota direksi BUS	
7. Hubungan keluarga anggota anggota direksi dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota direksi lain.	
8. Rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain atau lembaga lain.	

<p>9. Rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya.</p>	
<p>10. Struktur komite, keanggotaan, dan keahlian anggota.</p>	
<p>11. Daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh BUS. Pengungkapan mengenai konsultan paling kurang mencakup nama perusahaan konsultan, tujuan, dan ruang lingkup kerja.</p>	
<p>12. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham bagi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah</p>	
<p>13. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah</p>	
<p>14. Frekuensi rapat Dewan Komisaris Pengungkapan mengenai frekuensi rapat dewan komisaris paling kurang mencakup :</p>	

<p>1) Jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>2) Tingkat kehadiran masing-masing anggota yang diselenggarakan masing-masing anggota di setiap rapat yang dihadiri baik secara fisik maupun melalui teknologi telekonferensi.</p>	
<p>15. Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah.</p> <p>Pengungkapan mengenai rapat anggota Dewan Pengawas Syariah, paling kurang :</p> <p>1) Jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>2) Tingkat kehadiran masing-masing anggota yang diselenggarakan masing-masing anggota di setiap rapat yang dihadiri baik secara fisik maupun melalui teknologi telekonferensi.</p>	
<p>16. Jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian</p>	

<p>oleh BUS.</p> <p>Pengungkapan mengenai internal fraud paling kurang mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah internal fraud yang telah diselesaikan 2) Jumlah internal fraud yang sedang dalam proses penyelesaian di internal bank 3) Jumlah internal fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya 4) Jumlah internal fraud yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum 	
<p>17. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaiannya oleh BUS. Pengungkapan mengenai permasalahan hukum paling kurang mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) 2) Jumlah permasalahan hukum 	
<p>18. Transaksi yang</p>	

mengandung benturan kepentingan	
19. Buy back shares dan/atau buy back obligasi BUS	
20. Penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun pihak penerima dana.	
21. Pendapatan non halal dan penggunaannya. Pengungkapan mengenai non halal dan penggunaannya paling kurang meliputi sumber pendapatan non halal, nilai, dan penggunaannya.	

Sumber : Diolah dari Botosan (1997)

Adapun untuk indeks Luas Pengungkapan *Good Corporate Governance* masing-masing bank syariah dihitung dengan cara membandingkan jumlah rata-rata skor aktual perusahaan dengan jumlah skor maksimal yang dapat diperoleh perusahaan (Haniffa dan Hudaib, 2004).

$$ILP = \frac{\text{Total skor yang diungkapkan bank syariah}}{\text{skor maksimum yang dapat diperoleh}}$$

Variabel Independen. Penelitian ini menggunakan variabel independen berupa kinerja zakat. Karena zakat merupakan tujuan dari akuntansi Islam dan salah satu ukuran kinerja perbankan syariah. Dalam penelitian ini, kinerja zakat diproksikan dengan perbandingan zakat terhadap total aset yang dirumuskan sebagai berikut (Shahul Hameed) :

$$ZKTA = \frac{\text{Zakat}}{\text{Total Aset}}$$

Teknik Analisis Data

Metode statistik yang digunakan adalah statistik parametrik, yang meliputi statistik deskriptif, analisis regresi sederhana, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, uji F, dan uji t dengan asumsi bahwa data terdistribusi normal. Pengujian statistik dalam penelitian ini menggunakan bantuan program *Statistical Package for The Social Sciences (SPSS) Versi 22*.

Berikut diuraikan metode statistik parametrik yang akan digunakan dalam penelitian ini :

Statistik Deskriptif. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2006:19)

Uji Hipotesis. Parametrik digunakan jika distribusi data yang digunakan normal. Sedangkan non parametrik digunakan jika distribusi data yang digunakan tidak normal. Salah satu jenis dari uji parametrik adalah uji regresi. Untuk menguji hipotesis yang diajukan peneliti maka akan dilakukan dengan uji koefisien determinasi, uji pengaruh simultan (F test), dan uji parsial (t test).

Analisis Regresi Linear Berganda. Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen untuk memprediksi nilai rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan satu persamaan. Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan independen. Adapun model dasarnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + e$$

Dimana :

Y : Luas Pengungkapan Corporate Governance

a : konstanta persamaan regresi

β_1 : Kinerja Zakat (Variabel Independen)

Hipotesis. Hipotesis mayor penelitian ini adalah : “Kinerja Zakat mempengaruhi Luas Pengungkapan *Corporate Governance* Bank Umum Syariah di Indonesia ”. Adapun hipotesis minor dalam penelitian ini adalah : artinya dinyatakan “cocok” atau “fit” jika hipotesis nol diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Dependen dan Independen

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LPn	53	.380952	.909524	.69478311	.158117472
ZKTA	53	.000000	.005667	.00063328	.001295111
Valid N (listwise)	53				

Variabel kinerja zakat yang diproksikan dengan ZKTA menunjukkan nilai maksimum 0.005667 dan nilai minimumnya sebesar 0.0000 dari jumlah data yang digunakan (N) sebanyak 53. Dari N= 53 tersebut diperoleh rata-rata untuk variabel ini sebesar 0.000633328 dengan standar deviasi 0.001295111. Sementara variabel Luas Pengungkapan *Corporate Governance* yang diproksikan dengan LPn menunjukkan nilai maksimum 0.909524 dan nilai minimumnya sebesar 0.380952 dari jumlah data yang digunakan (N) sebanyak 53. Dari N=53 tersebut diperoleh rata-rata untuk variabel ini sebesar 0.69478311 dengan standar deviasi 0.158117472.

Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beta *standardized coefficient*. Keuntungan menggunakan nilai *beta standardized coefficient* adalah mampu mengeliminasi perbedaan unit ukuran pada variabel independen (Ghazali, 2006:92). Karena pada penelitian ini terdapat perbedaan satuan ukuran pada variabel independen yang digunakan dalam model regresi, maka pada penelitian ini nilai beta *Standardized Coefficient* digunakan dalam menentukan persamaan regresi.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.596	.293		2.034	.0001
ZKTA	-39.973	28.649	-.336	-1.395	.0001

a. Dependent Variable: LPn

Dari hasil perhitungan dan regresi linear berganda pada tabel di atas, dapat diketahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dapat dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut :

$$LPn = -0.336ZKTA + e$$

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel luas pengungkapan *Good Corporate Governance*. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang mendekati satu artinya variabel independen penelitian memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel Luas Pengungkapan GCG (LPn). Hasil koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel 4.7 sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.716 ^a	.672	.520	.132719946	1.834

a. Predictors: (Constant), ZKTA,

b. Dependent Variable: LPn

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Oleh karena itu, dianjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R^2 pada saat mengevaluasi model regresi terbaik (Ghozali, 2006:87). Dari tabel koefisien determinasi di atas, dapat dilihat bahwa angka koefisien korelasi (R) sebesar 0,716. Hal ini berarti bahwa hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen sebesar 71,6%. Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen cukup kuat.

Besarnya adjusted R^2 adalah 0,52. Hasil perhitungan statistik ini berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi perubahan variabel dependen sebesar 52%, sedangkan sisanya 48% diterangkan oleh faktor-faktor di luar model regresi yang dianalisis.

Pembahasan

Islam adalah agama dan dunia, ibadah dan muamalah, aqidah dan syariah, kebudayaan dan peradaban, agama dan negara. Menurut Qardhawi ditegaskan : “.....bagian ibadah Islam yang pokok itu, adalah salah satu ibadah khusus yang istimewa, yang pada kenyataannya merupakan bagian dari sistem keuangan dan ekonomi dalam pandangan Islam”. Ibadah zakat, itulah yang dimaksud Yusuf Qardhawi. Dengan demikian jelas, bahwa upaya menemukan teori atau melakukan penelitian harus dilandaskan pada Islam sebagai sesuatu yang integral. Kemudian diturunkan sampai pada bagian yang operasional, salah satunya adalah pengaturan zakat. Artinya, perkembangan perbankan syariah, khususnya di Indonesia haruslah diikuti dengan mekanisme aturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Di Indonesia sendiri, perkembangan bank syariah sendiri bak jamur di musim hujan. Masing-masing bank berlomba-lomba untuk mendirikan unit-unit usaha syariah, yang pada akhirnya bermetamorfosis menjadi bank umum syariah. Penulis berpendapat, bahwa bank-bank yang ada hanya sekedar menjawab kebutuhan pasar untuk meraih profit sebesar-besarnya, tapi

belum menjawab kebutuhan pasar untuk memenuhi aturan syariah. Karena, ketika bicara tentang kinerja zakat, maka ini akan berbanding lurus dengan harta yang dimiliki sebuah bank. Artinya, semakin besar harta yang dimiliki bank, maka semakin besar kinerja zakat atau kemampuan bank untuk membayar zakat, karena zakat merupakan sesuatu yang bersifat *compulsory* bagi bank syariah, baik pelaksanaan maupun pengungkapan. Namun, realitanya, saat penulis melakukan olah data dengan membandingkan jumlah zakat terhadap total aset, betapa banyak bank syariah yang bahkan sudah *shuttle* belum memenuhi kriteria presentase zakat sebesar 2.5%. Bagi penulis, ini merupakan sebuah anomali, karena idealnya sebuah perbankan syariah, yang menggunakan ‘nama’ syariah seharusnya taat pada aturan syariah. Begitu pula saat penulis melakukan pengukuran luas pengungkapan *Good Corporate Governance*, dimana salah satunya adalah pengungkapan informasi distribusi zakat dari bank syariah, ternyata tidak sedikit bank umum syariah yang ‘tidak serius’ dalam mengungkapkan informasi tentang kinerja zakatnya dalam Laporan Pelaksanaan GCG.

Fakta tersebut melahirkan pertanyaan besar dalam benak penulis, benarkah bank umum syariah telah ‘murni’ syariah? Atau hanya sekedar label untuk membuat pasar tertarik? Karena, selain penulis berpendapat seperti di atas, berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa kinerja zakat berpengaruh negatif signifikan terhadap luas pengungkapan GCG. Hal ini berarti semakin buruk kinerja zakat bank umum syariah atau semakin kecil presentase zakat bank umum syariah, maka bank akan melakukan pengungkapan informasi GCG yang lebih baik. Menurut penulis, bank syariah akan membuat laporan pelaksanaan GCG yang lebih ‘cantik’ untuk menutupi ketidakpatuhannya dalam syariah, yang dalam penelitian penulis menggunakan kinerja zakat terhadap total aset sebagai ukuran. Hal ini sesuai dengan teori legitimasi bahwa bank akan mengungkapkan informasi yang baik untuk memperoleh legitimasi telah memenuhi nilai-nilai yang ada di masyarakat. Karena, salah satu item pengungkapan GCG dalam Laporan Pelaksanaan GCG adalah pengungkapan tentang distribusi zakat. Menurut penulis, ketika bank umum syariah melaporkan distribusi yang baik, pengungkapan dengan kelengkapan grafik, informasi kuantitatif, dan kualitatif seperti yang telah penulis lakukan dengan metode skoring keluasan menggunakan 0, 1 dan 2, maka *stakeholder* akan melihat bahwa bank umum syariah telah memiliki kinerja zakat yang baik. Menurut penulis, hal ini disebabkan karena bank umum syariah saat ini, masih berorientasi pada keuntungan, bukan pada zakat. Sehingga dalam hal pengelolaannya pun belum optimal. Seperti yang telah penulis rumuskan di kerangka pemikiran,

bahwa ketika bank umum syariah memiliki kinerja zakat yang baik, ia akan mengungkapkannya dalam Laporan Pelaksanaan GCG pun dengan sempurna, karena bank umum syariah harus meyakini bahwa pertanggungjawaban yang sesungguhnya adalah kepada Allah SWT. Begitu pula sebaliknya, saat kinerja zakat bank umum syariah buruk maka, ia akan mengungkapkannya sesuai dengan apa yang terjadi, karena inilah bentuk transparansi horizontal sekaligus transparansi vertikal.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan latar belakang, landasan teori, analisis data, dan hasil pengujian yang dilakukan terhadap hipotesis, maka disimpulkan bahwa kinerja berpengaruh negatif signifikan terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance* Bank Umum Syariah di Indonesia.

Saran

Dengan memperhatikan keterbatasan penelitian, maka saran yang diberikan penulis untuk penelitian selanjutnya adalah pihak manajemen dan regulator harus bekerjasama demi tercapainya sebuah pengungkapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar, bukan hanya semata-mata memenuhi formalitas tapi juga memenuhi kepatuhan syariah yang telah ditetapkan oleh Islam itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'anul Karim

Abdul Rahman, Abdul Rahim. 2007. "Pre-Requisites For Effective Integration of Zakah Into Mainstream Islamic Financial System in Malaysia". *Islamic Economic Studies*, Vol. 14 No.1&2 : 91-107.

Ali Shah, Syed Zulfiqar., Butt, Safdar Ali., Hasan, Arshad. 2009. "Corporate Governance and Earning Management an Empirical Evidence Form Pakistani Listed Companies". *European Journal of Scientific Research*, Vol. 26 No. 4.

Ariffin, Noraini Mohd., Archer, Simon., Abdel Karim, Rifaat Ahmed. 2009. "Issues of Transparency in Islamic Banks". *Review of Islamic Economics*, Vol. 13 No.1

Arifin, Zainul. 2009. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang. Azkia Publisher.

Chapra, M.Umer dan Ahmed, Habib. 2008. *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta. Bumi Aksara.

Bank Indonesia, 2009. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Bank Indonesia, 2010. Surat Edaran No.12/13/DPbS kepada Semua Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Botosan A, Christine. 1997. "Disclosure Level and The Cost of Equity Capital". *The Accounting Review*, Vol.72 No.3.

Chapra, M.Umer dan Ahmed, Habib. 2008. *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta. Bumi Aksara.

Darmadi, Salim. 2011. "Corporate Governance Disclosure in The Annual Report : An Exploratory Study on Indonesia in Islamic Banking Damayanti, Tri. 2008. "Corporate Governance Bank Syariah dan Pengungkapannya dalam Laporan Tahunan". *Jurnal Ekonomi Islam FOSSEI* : 15-22.

Grais, Wafik dan Pellegrini, Matteo. 2006. "Corporate Governance and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services". *World Bank Policy Research Working Paper* 4054.

Haniffa, Roszaini dan Hudaib, Mohammad. 2007. "Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports". *Journal of Bussiness Ethics* : 97-116.

Haniffa, Roszaini dan Hudaib, Mohammad. 2004. "Disclosure Practices of Islamic Financial Institution". *Working Paper Series No.04/32*

Haniffa, Ros dan Cooke, Terry. 2000. "Culture, Corporate Governance and Disclosure in Malaysia Corporations". Presented at The Asian AAA World Conference in Singapore, 28-30 Agustus 2000).

Hameed,Shahul., Wirman, Ade., Alrazi, Bakhtiar., Nazli, Mohd., Pramono, Sigit. "Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks". Department of Accounting, International Islamic University Malaysia.

Hidayah, Erna. 2008. " Pengaruh Kualitas Pengungkapan Informasi terhadap Hubungan antara Penerapan Corporate Governance dengan Kinerja Perusahaan di Bursa Efek Jakarta". *JAAI Volume 12 No.1*, Juni 2008

Hossain, Mohammed. 2008. "The Extent Disclosure in Annual Reports of Banking Companies : The Case of India". *European Journal of Scientific Research*, Vol. 3 No. 4.

Klapper, Leora F dan Love, Inessa. 2002. "Corporate Governance, Investor Protection, and Performance in Emerging Markets". *World Bank Policy Research Working Paper* 2818.

- Kuppusamy, Mudiarsan., Saleh, Ali Salman., Samudhram, Ananda. 2010. "Measurement of Islamic Banks Performance Using a Shari'ah Kusumo, Yunanto Adi Kusumo. 2008.
- Maali, Bassam., Casson, Peter., Napier Christopher. 2006. "Social Reporting in Islamic Banking". ABACUS, Vol. 42 No.2, 2008.
- Muhammad. 2002. Penyesuaian Teori Akuntansi Syariah : Perspektif Akuntansi Sosial dan Pertanggungjawaban.
- Permasih, Dian. 2008. " Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pada Perusahaan Food and Beverage di Bursa Efek Indonesia".
- Rehman, Ramiz ur dan Mangfa, Inayat Ullah. 2010."Corporate Governance and Performance of Financial Institution in Pakistan". <http://ssrn.com>
- Sihite, Adelina. 2010. "Analysis of The Influence of Company Characteristics to Mandatory Disclosure on Index LQ 45 Companies". Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma.
- Tapanjeh, Abdussalam Mahmoud Abu. 2007. "Corporate Governance from The Islamic Perspective : A Comparative Analysis with OECD Principles". Critical Perspective on Accounting.
- Wan Ibrahim, Wan Hakimah., Ismail, Abdul Ghafar., Wan Mohd Zaharia, Wan Najihah. 2011. "Disclosure, Risk and Performance in Islamic Banking : A Panel Data Analysis". International Research Journal of Finance and Economics, Issue 72 : 100- 113.